

**ANALISIS PERMASALAHAN ASET TETAP PADA  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Pada Entitas Pemerintah Daerah  
di Provinsi Papua Barat)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**MUHAMMAD SAHLAN**  
**NIM. 12030113183008**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Muhammad Sahlan  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113183008  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PERMASALAHAN ASET TETAP  
PADA LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS  
PADA ENTITAS PEMERINTAH DAERAH  
DI PROVINSI PAPUA BARAT)**

Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto, S.E., M.Si.,Akt.

Semarang, 1 Desember2015

Dosen Pembimbing



(Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt.)  
NIP. 197412222000121001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN


Nama Penyusun : Muhammad Sahlan  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030113183008  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PERMASALAHAN ASET TETAP  
PADA LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS  
PADA ENTITAS PEMERINTAH DAERAH  
DI PROVINSI PAPUA BARAT)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal : 11 Desember 2015**

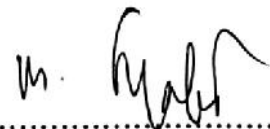
Tim Penguji

1. Dr. Haryanto, S.E., M.Si.,Akt.


(..... )

2. Dr. EndangKiswara, S.E., M.Si.,Akt.



(..... )

3. Dr. Indira Januarti, S.E., M.Si.,Akt.

(..... )

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Muhammad Sahlan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 Desember 2015



(Muhammad Sahlan)

NIM. 12030113183008

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai analisis atas permasalahan pelaporan aset tetap pada Laporan Keuangan entitas Pemerintah Daerah di wilayah provinsi Papua Barat tahun anggaran 2010 - 2013.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan studi literatur yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit oleh BPK-RI, khususnya terkait dengan masalah pelaporan aset tetap yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terjadi permasalahan terkait dengan pelaporan aset tetap, yaitu masalah penatausahaan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; serta masalah terkait pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan penyusutan atas aset tetap belum diterapkan hingga tahun anggaran 2013, padahal mulai hingga tahun anggaran 2015, kegiatan penyusutan atas aset tetap sudah wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan terkait dengan pelaporan aset tetap di atas adanya lemahnya Sistem Pengendalian Internal organisasi dan kurangnya sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Oleh karena itu, agar pelaporan aset tetap dapat diterapkan secara efektif di dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pihak Pemerintah Daerah harus bisa mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Selain itu, pihak Pemerintah Pusat juga harus ikut andil dalam upaya perbaikan kualitas pengadaan sumber daya manusia di daerah-daerah yang masih membutuhkan pembinaan dalam hal penyusunan laporan keuangan, khususnya terkait laporan aset tetap.

Kata kunci : Permasalahan Aset Tetap, Pelaporan Aset Tetap, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **ABSTRACT**

*The focus of this study is about analysis of fixed asset reporting problem on financial reports of the whole Local Government entity in Papua Barat province 2010 – 2013.*

*This research is a qualitative descriptive research with literature study analysis of the fixed assets problem that are presented in the Local Government financial reports. The results shows that there are many problem of fixed asset, such as administration problem, maintenance and security problem, assessment problem, and control problem. Depreciation activity, as a main characteristic of accrual basis is never done until 2013. This activity will be obliged in 2015.*

*The main factors affecting this issue is a lack of internal control system and human resources weakness. Therefore, this research suggest that Local Government should have to fix their weaknesses and Central Government could help a Local Government that still need assistance through the deployment of its human resources.*

*Keywords: Fixed Asset Issues, Fixed Asset Reporting, Property Management, Local Governments Financial Report*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat)” ini. Shalawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun secara materiil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran-saran yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Darsono., S.E., MBA., Akt. selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan nasehat selama masa perkuliahan di Kelas

Kerjasama BPK Tahun 2013 Jurusan Akuntansi Program Studi S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

5. Para Dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal pengetahuan serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Badan Pemeriksa Keuangan RI yang telah memberikan kesempatan tugas belajar kepada penulis.
7. Orang Tua tercinta, ayahanda Saksono Johan dan ibunda Siti Sopiah, istri penulis, Nani serta ananda Afia Adeena Raushani yang selalu mendoakan dan menghadirkan suasana semangat kepada penulis setiap saat.
8. Teman-teman seangkatan Kelas Kerjasama BPK-RI Undip Tahun 2013, Putri, Upik, Rifan, Nawa, Imron, Dana, Hei, Ikhlas, Widhi dan Asrofi yang sudah memberikan banyak warna dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
9. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tim 1 Tahun 2014 Desa Kalikondang, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak, Bogie, Fian, Imron (lagi), Putri, Findri dan Mareta yang senantiasa kompak dalam menyemangati penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan dukungan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan dan menghargai berbagai kritik dan saran yang sifatnya membangun demi sempurnanya penulisan skripsi ini dan dapat



menambah pengetahuan bagi penulis, pembaca atau pihak yang membutuhkannya, dan bagi penelitian selanjutnya.

Semarang, Desember 2015

Penulis,

Muhammad Sahlan  
NIM. 12030113183008

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1. Pengertian Aset Tetap .....	9
2.1.2. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua.....	22

2.1.3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 tentang Aset Tetap (Revisi 2011).....	26
2.1.4. Standar dan Penyajian Aset Tetap dalam Neraca Menurut <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> .....	29
2.1.5. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) .....	31
2.2 Kerangka Pemikiran .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
3.1. Populasi dan Sampel .....	41
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	41
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	42
3.4. Metode Analisis .....	42
3.5. Desain Penelitian .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b> .....	<b>46</b>
4.1. Analisis atas Opini Audit LKPD Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat TA 2010 s.d 2013 dan Hubungannya dengan Temuan Terkait Aset Tetap .....	46
4.2. Analisis Mutasi Aset Tetap .....	52
4.3. Analisis Masalah Pelaporan Aset Tetap .....	55
4.3.1. Penatausahaan yang Kurang Memadai.....	55
4.3.2. Lemahnya Pengamanan dan Pemeliharaan atas Aset Tetap .....	58
4.3.3. Kesalahan Dalam Penilaian Aset Tetap .....	61
4.3.4. Lemahnya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Aset Tetap .....	64

4.3.5. Kegiatan Penyusutan Aset Tetap Belum Dilakukan .....	66
4.4. Analisis Faktor Permasalahan Terkait Pelaporan Aset Tetap .....	67
BAB V PENUTUP .....	71
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Keterbatasan .....	72
5.3. Saran.....	72
5.4. Implikasi.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN .....	77

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Opini audit atas LKPD TA 2010 s.d TA 2013 .....	48
Tabel 4.2 Opini audit atas LKPD di Papua Barat TA 2010 s.d TA 2013.....	48
Tabel 4.3 Rincian Nilai Temuan Audit terkait akun Aset Tetap atas LKPD di wilayah Papua Barat TA 2010 s.d TA 2013.....	49
Tabel 4.4 Rincian Nilai Aset Tetap Pemerintah Daerah di wilayah Papua Barat TA 2010 s.d TA 2013 .....	53
Tabel 4.5 Rincian Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di wilayah Papua Barat TA 2010 s.d TA 2013 .....	54
Tabel 4.6 Ringkasan Permasalahan Terkait Pelaporan Aset Tetap dan Faktor Penyebabnya pada Entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat TA 2010 s.d TA 2013 .....	70

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	45
Gambar 4.1 Grafik Kualitas Opini Audit LKPD TA 2010 s.d TA 2013 .....	46
Gambar 4.2 Grafik Kualitas Pembobotan Opini Audit LKPD Entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat TA 2010 s.d TA 2013 ...	51
Gambar 4.3 Grafik Persentase Nilai Temuan Audit terkait akun Aset Tetap atas LKPD di wilayah Papua Barat TA 2010 s.d TA 2013 .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Rincian Opini audit atas LKPD di wilayah Papua Barat TA 2010 s.d TA 2013.....	76
Lampiran B Persentase Nilai Temuan Audit Terkait Aset Tetap dengan Nilai Total Aset Tetapnya Pada Entitas Pemerintah Daerah di wilayah Papua Barat TA 2010 s.d TA 2013.....	77
Lampiran C Perbandingan Nilai Mutasi Aset Tetap Terhadap Nilai Realisasi Belanja Modal Pada Entitas Pemerintah Daerah di wilayah Papua Barat TA 2010 s.d TA 2013 .....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pada tahun 2003 pemerintah Indonesia telah memulai reformasi di bidang manajemen keuangan negara khususnya akuntansi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Wujud transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan negara itu sendiri tercermin dalam Laporan Keuangan yang disusun setiap tahunnya oleh semua instansi pemerintah.

Laporan Keuangan instansi pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah masih banyak yang memperoleh opini *Disclaimer* (Tidak Memberikan Pendapat) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Berdasarkan data yang diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang dikeluarkan oleh BPK, khusus Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga Tahun Anggaran 2008, opini BPK terhadap LKPD ini masih didominasi dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang mencapai porsi hingga 67% atau 324 LKPD, selanjutnya opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) mencapai porsi hingga 24% atau 116 LKPD, opini Tidak Wajar (TW) sebesar 6% atau 31 LKPD dan terakhir opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang baru mencapai angka 3% atau 12 LKPD. Beberapa pemerintah daerah yang mendominasi opini *Disclaimer* ini adalah pemerintah daerah yang ada di Provinsi



Papua Barat dimana dari total 10 entitas yang ada saat itu, 2 Pemerintah Daerah memperoleh opini WDP dan 8 Pemerintah Daerah memperoleh opini TMP.

Lima tahun berselang, yakni pada Tahun Anggaran 2013 di saat Standar Akuntansi Pemerintahan sudah berganti menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah mulai mengalami peningkatan, hanya saja opininya masih didominasi oleh opini WDP. Selain itu beberapa daerah juga masih mendapat opini *Disclaimer* (TMP) dan *Adverse* (TW). Melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berdasarkan PP 71 Tahun 2010 ini, menurut data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2014, dari total 456 LKPD Tahun Anggaran 2013 yang diperiksa BPK, 60% didominasi opini WDP yakni sebanyak 276 LKPD, 31% dengan opini WTP atau sebanyak 153 LKPD, 4% opini TMP atau sebanyak 18 LKPD dan terakhir 2% opini TW atau sebanyak 9 LKPD. Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 ini berjumlah 12 entitas dengan rincian opini sebagai berikut : 4 Pemerintah Daerah memperoleh opini WTP (termasuk 1 opini WTP dengan Paragraf Penjelasan), 5 Pemerintah Daerah memperoleh opini WDP dan sisanya 3 Pemerintah Daerah memperoleh opini TMP. Data lebih rinci dari IHPS II 2014 menyebutkan bahwa dari total 294 LKPD seluruh Indonesia yang masih memperoleh opini WDP dan TMP tersebut di atas, ternyata sekitar 21% atau 61 LKPD mengalami permasalahan (pengecualian) akun pada Laporan Keuangannya. Dan dari total 61 LKPD ini, mayoritas akun yang mendapat pengecualian adalah akun Aset Tetap pada neraca

yang mencapai 54 LKPD. Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Papua Barat sendiri menyumbang 6 LKPD yang bermasalah atas akun aset tetapnya.

Permasalahan aset, khususnya aset tetap memang merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada hampir setiap instansi pemerintah yang memiliki aset dengan jumlah yang sangat besar. Menurut Machfud Sidik (2006), jumlah dan potensi kekayaan/aset Negara yang begitu besar dirasakan masih belum dapat mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan/aset negara. Hal ini disebabkan oleh :

- 1) Keberagaman kekayaan/aset negara secara jenis dan letak geografis;
- 2) Adanya keragaman kepentingan yang melekat;
- 3) Adanya pihak yang secara langsung atau tidak langsung menguasai;
- 4) Inefisiensi alokasi;
- 5) Belum adanya unifikasi regulasi;
- 6) Koordinasi dan pengawasan yang lemah; dan
- 7) Belum terwujudnya basis data yang terintegrasi.

Hal ini menyebabkan kompleksitas masalah dan kerap tumpang tindih dalam pelaksanaan pengelolaannya dimana hal ini nantinya berpotensi untuk merugikan negara.

Pengelolaan barang milik negara/daerah (dimana pengelolaan aset termasuk di dalamnya) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sendiri meliputi 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2) pengadaan; 3) penggunaan; 4) pemanfaatan; 5) pengamanan dan pemeliharaan; 6) penilaian; 7) penghapusan; 8) pemindahtanganan; 9) penatausahaan; dan 10) pembinaan,

pengawasan dan pengendalian. Bagi pemerintah daerah, peraturan lebih rinci terkait pengelolaan barang milik daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut SAP PP 71 Tahun 2010, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai

pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Beberapa permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tetapnya tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu permasalahan ini juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah.

Kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan. Penyusutan sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan ini nantinya akan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca sekaligus sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional. Permasalahan ini mungkin saja terjadi di setiap instansi pemerintahan karena peraturan teknis terkait penyusutan untuk instansi pemerintah daerah masih belum ada. Untuk instansi pemerintah pusat baru, peraturan teknis baru dibuat pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.

Berdasarkan uraian di atas, dengan memperhatikan opini BPK-RI terhadap pemerintah daerah di provinsi Papua Barat dan hubungannya dengan permasalahan-permasalahan terkait akun aset tetap, maka penting rasanya untuk dapat mengetahui lebih lanjut berbagai permasalahan atas aset tetap yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Papua Barat. Atas dasar

tersebut, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul “**Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Entitas Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta yang sudah diuraikan pada latar belakang permasalahan di atas, beberapa inti permasalahan yang akan dibahas secara lebih mendalam adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada pelaporan aset tetap di dalam laporan keuangan entitas Pemerintah Daerah di wilayah provinsi Papua Barat.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab utama terkait dengan permasalahan aset tetap pada entitas di wilayah provinsi Papua Barat.
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan pada entitas di wilayah provinsi Papua Barat.
4. Bagaimana pengaruh permasalahan pelaporan aset tetap ini terhadap opini audit atas LKPD yang diberikan oleh BPK-RI.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan berbagai permasalahan yang terjadi terkait pelaporan aset tetap pada entitas di wilayah provinsi Papua Barat
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyebab utama atas permasalahan aset tetap pada entitas di wilayah provinsi Papua Barat.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan pada entitas di wilayah provinsi Papua Barat.
4. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana permasalahan aset tetap ini memberikan pengaruh terhadap kualitas opini audit atas LKPD yang diberikan oleh BPK-RI.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pelaporan aset tetap, baik dalam ruang lingkup pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar kualitas pelaporan terkait aset tetap tidak lagi menjadi halangan dalam perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang Akuntansi Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan aset tetap.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian terdiri dari lima bab, yaitu:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Telaah Pustaka**

Bab telaah pustaka menjelaskan landasan teori, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi penjelasan tentang penentuan populasi serta sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang dilakukan.

### **BAB IV : Hasil Dan Analisis**

Bab ini berisi penjelasan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, penulis juga akan menguraikan kekurangan dan keterbatasan yang dijumpai dalam penelitian serta saran-saran bagi penelitian lainnya.